Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 3 (1) (2015): 1-13

Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma

Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan

Susi Susanti dan Adelita Lubis*

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Partisipasi merupakan salah satu aspek mendasar dalam jalannya Demokrasi pemerintahan. Dalam penelitian ini, Partisipasi Politik Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan mereka dalam kepengurusan partai. Namun pembahasan dan permasalahan perempuan dengan politik selalu mengalami pasang surutnya suatu partisipasi politik perempuan di Kota medan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwasanya keterlibatan atau partisipasi politik perempuan di PKS cukup tinggi. Ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yang paling dominan adalah faktor budaya, dan faktor kurang dikenalnya perempuan-perempuan dari PKS. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut harus dipahami peran dan wewenang yang dimiliki dan digunakan untuk kemajuan kaum perempuan. Permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di DPD Kota Medan periode 2009-2014, karena pemeenuhan kuota 30% caleg perempuan yang belum benar-benar serius diterapkan oleh partai-partai yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Partisipasi Politik; Perempuan; Partai Keadilan Sejahtera.

Abstract

Participation is one of the fundamental aspects in the course of the Democratic administration. In this study, the Women's Political Participation in the Prosperous Justice Party (PKS) is quite high. It can be seen from their involvement in the management of the party. But the discussion of women's issues in politics and always have ups and downs of a women's political participation in the City field. From the results of this research note that women's political involvement or participation in the MCC is quite high. It is caused by several factors, including the most dominant cultural factors, and factors are less known women from the MCC. To keep pace with the need to understand the role and the authority held and used for the progress of women. The problems described in this study is the low level of political participation of women in Medan City Council 2009-2014 period, as pemeenuhan quota of 30% women candidates who have not really seriously implemented by parties that exist in Indonesia.

***Keywords**: Political Participation; women; Prosperous Justice Party*

How to Cite: Susi S dan Adelita L. (2015). Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik,* 3 (1): 1-3.

*Corresponding author:
E-mail: adelitalubisuma@gmail.com

p-ISSN: 2549 1660

PENDAHULUAN

Peran perempuan di Tanah Air telah dimulai sejak zaman penjajahan. Munculnya tokoh perempuan Indonesia seperti R.A Kartini, R. Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dien dapat menjadi contoh. Harus diakui bahwa meski sudah banyak tokoh perempuan yang sukses, namun pada sisi lain masih banyak pula hambatan yang dialami kaum perempuan untuk tampil dalam sektor publik. Misalnya, terkait peran perempuan dalam politik, hampir di seluruh negara, khususnya di negara berkembang, menghadapi sejumlah kendala baik struktural maupun kultural. Kendala struktural tersebut sering kali berkaitan dengan permasalahan pendidikan, status sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Pekerjaan perempuan masih sering diidentikkan dengan pekerjaan "kelas dua" yang sulit berimbang dengan laki-laki. Sementara kendala kultural terkait dengan faktor budaya dalam masyarakat seperti menempatkan perempuan sebagai untuk sekedar tinggal dirumah. Kini konsep kesetaraan gender dianggap sebagai sebuah jawaban untuk mengatasi persoalan perempuan tersebut. Gerakan ini sudah berkembang menjadi gerakan massal yang sangat berpengaruh. (www.asiandevbank.org).

Reformasi yang dialami bangsa Indonesia pada tahun 1998 membawa perubahan pada sistem politik terutama sistem Pemilu. Perubahan ini membuka peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat di dalamnya, menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik. Bagi kaum perempuan di Indonesia, perubahan sistem politik itu juga memberi harapan bagi mereka untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata.

Perubahan dalam sistem Pemilu antara lain, diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2003 merupakan Legitimasi kuota 30% bagi keterwakilan perempuan sebagai caleg dari partai politik, dan jumlah partai politik peserta Pemilu tidak lagi dibatasi sehingga ada partai politik yang mengatasnamakan kaum perempuan Indonesia. Kuota anggota legislatif perempuan sekurang-kurangnya 30% di partai politik dan parlemen, merupakan kebijakan yang positif bagi pemberdayaan partisipasi politik perempuan.Jumlah pemilih dalam Pemilu 2004 lebih dari 51% nya adalah perempuan. Seharusnya, idealnya kaum perempuan secara struktural memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi politisi, dibandingkan pada Pemilu sebelumnya. (www.rahima.or.id)

Dalam UU No 10 tahun 2008:3 Memuat beberapa kemajuan yang melindungi hak perempuan didalam politik yaitu: Pendirian daftar pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan; Kepengurusan partai politik baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota di susun dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan; Koderasi yaitu parpol melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

Pada UU No 10 Tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi "bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu untuk setiap daerah pemilihan umum paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Makna 30% adalah bahwa pemerintah menghimbau perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sistematis dan terprogram untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan. Salah satu organisasi-organisasi yang memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan adalah partai politik salah satunya PKS.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir sebagai sebuah partai politik yang tampilannya berbeda dibandingkan dengan partai politik yang ada. Mengingat PKS sebagai partai politik tidak hanya mengedepankan aspek politis dalam sepak

terjangnya, tapi juga menjadikan moral agama sebagai basis gerakannya. Sehingga tidak jarang PKS dijuluki sebagai partai politik dakwah atau partai politik yang tampilannya lebih dirasakan sebagai gerakan dakwah.

Menurut Burhanuddin (2008: 86) secara non-konvensional, kader perempuan PKS juga aktif melakukan mobilisasi konsensus dan aksi dalam berbagai demonstrasi yang rajin di gelar oleh partai. Sistem sel kaderisasi partai melalui usrah juga tidak bisa mengetepikan peran kader perempuan. Dengan kata lain, PKS banyak berhutang budi kepada perempuan. Secara internal, hanya 4 perempuan yang menjadi pengurus DPP PKS dari total sekitar 56 pengurus. Itupun keempat-empatnya dikumpulkan di Departemen Kewanitaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan, karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yang di desain memiliki konsikuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2004: 1) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan menurut Muhiddin Sirat (2006) metode penelitian adalah suatu suatu cara memilih masalah dan penentuan suatu judul penelitian. Dalam penelitian yang mengenai Partisipasi Politik Perempuan (Studi Pada Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan).

Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005:4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa suatu kata-kata tertulis atau sebagai lisan dari orang-orang dan prilaku-prilaku yang dapat di amati. Dalam penelitian ini peneliti mencoba penggalian terhadap unit atau individu secara mendalam.

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah DPD partai keadilan sejahtera, dengan ruang lingkup penelitian mangenai partisipasi politik perempuan pada DPD partai keadilan sejahtera kota medan.

Tempat penelitian: Kantor DPD Partai keadilan sejahtera Kota Medan, yang Beralamat di jalan sei-Beras Kec: Medan Baru No. 34

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas,akurat, dan terpecaya, keterangan, atau dapat membantu dalam memenuhi persoalan dan permasalahan. Proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam (suryanto 2005:175) seperti: Informan kunci: mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam Peneliti. seperti, ketua PKS kota medan atau Sekretariat DPD PKS Kota Medan; Informan Utama: mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti. seperti, Staff Pengurus DPD PKS Kota Medan; Informan Biasa: mereka yang memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di teliti.

Dalam penelitian kualitatif untuk pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan bertujuan mendapatkan informasi. Dalam penelitian kualitatif wawancara di lakukan secara mendalam yang merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data secara langsung bertatap muka dengan informan. Adanya proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam (Suryanto 2005: 171)

Menurut prof. Heru pada buku metode penelitian kualitatif mengatakan bahwa observasi adalah studi yang disengaja dan di lakukan secara sistematis, terencana, terarah, pada suatu tujuan

dengan mengamati dan mencakup fenomena satu atau sekelompok orang dalam kompleks kehidupan sehari-hari.

Dokumentasi dapat di artikan sebgai teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi suatu objek penelitian, baik berupa prosedur, paraturan-peraturan, gambar, laporan, laopran hasil kerja serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Analisi data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisi berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya di kembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analis telah di mulai sejak pengumpulan adata dan dilakukan lebih intensif lagi setelah kembali dari lapangan. Seluruh data yang tersedia telah direduksi sehingga menjadi berbentuk suatu informasi.

Satuan informasi inilah yang ditafsirkan dan diolah dalam bentuk hasil penelitian hinggga tahap kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setalah selesai di lapangan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh (Miles dan Hubren 1988:156) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisi data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verivikasi. Maka dalam kegiatan analisa datanya adalah: *pertama,* reduksi data, pada tahun ini terfokus pada pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema terbesar.

Kedua, penyajian data dalam kegiatan ini peneliti menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik di pisahkan, kemudian topik yang sama disimpan dalam satu tempat, masin-masing tempat diberi kode, dikarekan agar tidak terjadi ketimpangan data yang telah di jaring. *Ketiga,* data yang telah dikelompokkan sesuai dengan topik-topik, kemudian di teliti kembali dengan cermat, mana data yang sudah lengkap dan mana data yang belum lengkap yang masih memerlukan data tambahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dilapangan. Adapun teknik yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan. Kemudian data yang didapat dari hasil wawancara akan langsung dianalisis.

Pada 20 April 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan

Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Partai Keadilan Sejahtera adalah pelanjut dari Partai Keadilan. Sebelum melihat jauh tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kita harus meneropong sejarah Partai Keadilan. Partai Keadilan (PK) adalah partai yang didirikan di Jakarta pada senin, 26 Rabiul Awal 1419H yang bertepatan dengan 20 Juli 1998. dan kemudian dideklarasikan di Jakarta pada hari ahad, 9 Agustus 1998 di depan 50.000 pendukungnya yang memadati lapangan luas Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Sahar L. Hassan, Kuat Sukardiyono, Dadi M.H.Basri, Memilih Partai Islam, Jakarta: Gema Insani Press,1998, hal. 29)

Berkenaan dengan berdirinya PKS di Kota Medan maka ada satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa perjuangan PKS merupakan kelanjutan perjuangan dari Partai Keadilan (PK). Dengan demikian sejarah berdirinya PKS di Kota Medan didahului dengan berdirinya Partai Keadilan yang dideklarasikan pada tanggal 10 Oktober 1998 di Asrama Haji Medan oleh beberapa anggota inti partai yakni Muhammad Nuh, Sigit Pranomo Asri, dan FE. Astimen, dimana masa menjelang lahirnya partai ini beberapa aktivis dakwah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia melakukan pollingdan musyawarah serta menghasilkan persetujuan untuk melanjutkan perjuangan dakwah Islam melalui wadah partai politik.

Partai Keadilan Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik dimasa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual dan professional. Karena itu, Partai Keadilan Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah aktifitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam perpolitikan Indonesia hingga dikenal dengan eksis sampai saat ini.

"Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa."

Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat indonesia yang madani.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut: Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang; Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin; Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia; Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir; Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi; Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang menduku ng bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat; Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya; Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.

Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam

merealisir agenda reformasi. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan dan militer agar tetap berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik.

Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (bersih, peduli dan profesional). Membangun sistem politik yang sehat, penegakan hukum yang adil dan hankam yang mantap. Mengentaskan kemiskinan,mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan upgrading kemampuan teknologi dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resource* dan *knowledge*. Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Dakwah. Sedangkan dakwah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah dakwah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu dakwah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan dakwah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Atas dasar itu maka dakwah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak dakwah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.

Kebijakan partai diperlukan sebagai sebuah perspektif dan kerangka kerja yang menjadi patokan dasar aktifitas partai serta menjadi guidence bagi aktifis dalam merespon dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktifitas sosial politik. Dengan kebijakan dasar yang jelas dan diharapkan seluruh proses perjalanan partai dan aktifitasnya tetap berada dalam ideologi yang dianutnya.

Kebijakan dasar Partai Keadilan Sejahtera ini dimaksudkan untuk: 1. Meletakkan perspektif dan kerangka kerja Partai dalam menyusun dan mengoperasionalkan program-program strategis. 2. Memberikan kerangka umum kepada Partai untuk memudahkan dalam penyusunan program aksi dan langkah-langkah operasionalnya. 3. Menjadi patokan umum dalam memposisikan Partai sebagai kekuatan politik dalam berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat. 4. Menjadi guidancebagi aktivis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktivitas sosial politik.

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Dakwah. Sedangkan dakwah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah dakwah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu dakwah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan dakwah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya.Ia adalah dakwah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitasAtas dasar itu

maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai.

Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya. Kebijakan dasar partaid apat dilihat dalam dua rumusan yaitu Kebijakan Umum dan Strategi umum. Kebijakan umum dijabarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup kehidupan sehari-hari partai yaitu Ideologi, politik, birokrasi, ekonomi dan kesejahteraan, sosial budaya, peran dan tugas wanita, iptek dan hukum. Sementara itu strategi umum ditempuh melalui dua hal yaitu kebijakan Internal dan Eksternal.

Ideologi Partai Partai Keadilan Sejahtera berasaskan Islam. Sebagai partai yang berasaskan Islam Partai Keadilan Sejahtera menyusun platform yang sangat dipengaruhi corak dan garis pemikiran keIslaman. Secara umum para kader PKS mengikuti garis pemikiran Islam modern tetapi berbeda dengan garis pemikiran Islam modern Masyumi, Partai Bulan Bintang, ataupun Muhammadiyah. Disamping mengikuti pemikiran modernis, komunitas pendukung PKS juga memiliki amalan ritual yang dekat dengan komunitas Nahdiyin (NU) yakni pengamalan wirit tertentu yang seragam, yang wajib dibaca setiap hari dua kali, menjelang magrib dan setelah shalat subuh, yang disebut dengan wirit al-matsurat.

PKS adalah Partai Dakwah yang bercita - cita menegakkan syariat Islam diIndonesia. Namun cita - cita ini harus berada dalam kerangka persatuan dan kesatuan ummat dan bangsa, dengan menjalankan kewajiban sebagai ummat Islam tanpa menafikkan golongan lain.

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama antara sesama anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi menyediakan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Hubungan kerja dalam sebuah organisasi sangat berpengaruh terhadapkeberhasilan organisasi.

Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis dengan orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkanStruktur organisasi DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kota Medan.

Setelah mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud diadakan penilaian-penilaian terhadap hasil dari pendidikan dan pelatihan kader partai, untuk kemudian selanjutnya diadakan penetapan pengurus partai yang baru oleh hasil rapat musyawarah pengurus partai yang lama, atas dasar pertimbangan. Baik yang dilakukan dalam rapat selanjutnya di tingkat Majelis Pertimbangan Daerah tingkat kota. Dalam hal pengorganisasian, Partai Keadilan Sejahtera mempunyai mekanisme berbeda dengan partai lain. Dalam Partai Keadilan Sejahtera ada beberapa jenis dan jenjang keanggotaannya, antara lain sebagai berikut: Anggota kader pendukung, yang terdiri dari: Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.

Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu.

Anggota Kader Inti, yang terdiri dari: Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua.

Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.

Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.

Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.

Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Dari Hasil Wawancara dan Data yang didapat oleh ibu ***Dhiyaul Hayati,S.Ag.MPd****yaitu DPD Kota Medan memberikan Peluang besar bagi kaum Perempuan untuk Berpartisipasi Politik dalam Kepengurusan Partai. Hal ini dilihat Dari Struktur Organisasi DPD PKS Kota Medan Tahun 2014*.Adapun juga yang menyangkut dalam kepengurusan partai seperti diadakannya syarat-syarat Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan untuk wajib mengikuti syarat tersebut seperti di jelaskan.

Syarat-syarat Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut: Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai keadilan, dengansyarat (Pasal 1 dan 2): Warga Negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan; Berusia tujuh belas tahun ke atas, atau sudah menikah; Berkelakuan baik; Setuju dengan visi, misi, dan tujuan partai; Mengajukan permohonan menjadi anggota partai kepada Sekretariat Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah; Melaksanakan dan disiplin dengan kewajiban-kewajiban keanggotaan; Mengucapkan janji setia pada prinsip-prinsip dan disiplin partai, sesuai dengan jenis atau jenjang keanggotaannya.

Peran Perempuan untuk ikut bersosialisasi menunjukkan peran perempuan di mata masyarkat tidak kalah berbeda dengan laki-laki. Dengan adanya ikut serta perempuan mensosialisasikan di masyarakat, perempuan bisa menunjukkan kemampuannya dan kepeduliannya terhadap masyarakat Kota Medan. Para perempuan atau kader perempuan begitu antusias dalam memenangkan kursi di parlemen mereka begitu aktif dan peduli sudah mempersiapkan diri dari hari sebelumnya untuk tampil di ranah panggung politik. Begitu juga dengan perempuan yang di masyarakat mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk memilih pemimpinnya, para perempuan begitu peduli jika ada PEMILU mereka langsung buru antusias melihat calon pemimpinnya di banding para laki-laki.

Adapun Berbagai Upaya yang di lakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam memperjuangkan partisipasi perempuan pada pemilihan legislatif antara lain: Mempromosikan Diri : Seperti Memasang Baliho fhoto diri dan spanduk pinggir-pinggir jalan, persimpangan, pusat keramaian, dan bebrbagai tempat lainnya; Membagikan kartu nama,flayer,kaos yang berlatar belakang fhoto caleg; Membagikan calender beserta gambar caleg tsb; Membagikan jilbab bagi kaum perempuan di kegiatan perwiritan maupun di pengajian; Mengadakan kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan massa seperti : mengadakan gerak jalan santai, sepeda santai, bazar sembako murah, kegiatan gotong royong, dan lain sebagainya; Mendatangi kepengajian para ibu-ibu dan kepewiritan dengan memeberikan berbagai bantuan ke masjid; Dan mengunjungi warga yang sakit ataupun yang meninggal dunia, dll.

Dalam kemajuan tehnologi informasi membawa dampak pada perubahan sosial pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Jumlah kaum perempuan yang bekerja di luar rumah (di publik, sebagai Pegawai Negeri, di bidang Pemerintahan, Legislatif dan Yudikatif), semakin meningkat, di ikuti juga oleh fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga (Biro statistik "Strategi Kehidupan Perempuan Kepala Rumah Tangga").

Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja memang diharapkan bahkan memang diharapkan

bahkan didorong oleh negara lewat konsep ke mitrasejajaran pria dan wanita dalam GBHN. Diharapkan perempuan akan lebih banyak berpartisipasi dalam pembangunan untuk peningkatan pemberdayaan perempuan tidak saja untuk masa kini tetapi juga untuk masa yang akan datang agar tetap berkesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu aspek mendasar dalam jalannya demokrasi pemerintahan. Dalam penelitian ini partisipasi politik perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan mereka dalam kepengurusan partai. Partisipasi politik perempuan melibatkan lebih dari sekedar suara, bisa meliputu banyak hal selain bebasberbicara, berkumpul dan asosiasi. Selain itu pengumpulan data-data mengenai penelitian ini diperoleh dari sekretariat DPD PKS Kota Medan diketahui bahwasannya keterlibatan partisipasi politik perempuan di PKS cukup tinggi. Dikarenakan pada prinsipnya perempuan indonesia secara hukum memepunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki berkiprah di panggung politik dengan jumlah 3000 kader perempuan di Kota Medan Tahun 2014 begitu meningkat.

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi/ rekrutmen anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Menurut UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, khususnya pasal 7 ayat 5 dimana salah satu fungsi utama partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisisan jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Miriam Budiardjo, Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik juga berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment).

Setiap sistem politik memiliki sistem/ prosedur-prosedur yang berbeda dan proses rekrutmen selalu bermakna ganda. Pertama, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala Negara dan kepala daerah. Kedua, menyangkut transformasi peran-peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultural agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik. Sekurangnya, ada tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen politik, yaitu: Dalam konteks demokrasi, partai politik dirancang dan didirikan memang untuk berkompetisi meraih pengendalian kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara. Karena itu, wajar jika partai politik melakukan interalisasi pemahaman dan keahlian politik untuk dapat secara efektif memperoleh dan selanjutnya mempertahankan kekuasaan kepada anggota-anggotanya sebagai calon-calon aktor pengendali kekuasaan pemerintah. Disinilah kepentingan partai Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. Ketiga, pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik.Dengan tiga pertimbangan itu, kajian mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita menghampiri isu-isu krusial, seperti basis legitimasi politik, rute yang ditempuh kearah kekuasaan, keterwakilan politik, hubungan antara rekrutmen dan perubahan politik, dan akibat-akibat bagaimana masa depan politik.Politik perlu ditonjolkan terutama agar dapat menarik sebesar mungkin dukungan masyarakat untuk memenangkan kompetisi kekuasaan melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. Hal ini seperti yang ditegaskan

oleh Mochtar Mas'oed bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.

Jadi, dalam jumlah besar Partisipasi Politik Perempuan di DPD PKS memiliki jumlah Perempuan Yang meningkat sekitar 3000 Kader Perempuan di Kota Medan Pada Tahun 2014. Sehingga Partsipasi Poltik Perempuan di DPD Kota Medan sangat tinggi di lihat dari perekrutan kader perempuan di Kota Medan. ***Hal ini di dukung oleh hasil wawancara ibu Dhiyaul Hayati, S.Ag.MPd***

Realitas mengenai partisipasi perempuan dalam bidang politik terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Bisa dilihat bahwa sebagian besar terkait dengan faktor kultural, meneruskan apa yang pernah dilakukan orang tua, keyakinan untuk merubah kondisi perempuan saat ini, maupun kemauan yang datang dari diri sendiri.

Sepertiyang dikemukakan oleh Ibu Dhiyaul Hayati, S,Ag.M.Pd bahwa:

"Keikutsertaan saya di bidang politik disebabkan oleh faktor yang datang dari diri sendiri. Tetapi juga seizin suami. Malah suami juga mendukung keinginan saya". Kesadaran diri ini salah satunya adalah kesadaran untuk menyalurkan aspirasi. Adanya keinginan untuk melakukan perubahan dalam kehidupan perempuan yang masih termarjinalkan. Kesadaran ini muncul ketika melihat masih begitu banyak kepentingan perempuan yang terabaikan, misalnya saja upah yang tidak seimbang dengan beban kerja, masih banyak perempuan yang berpendidikan rendah dan buta huruf.

Berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan diranah publik. Seperti yang dikatakan ibu laila fathi nasution

Menurut Ibu Laila Fathi Nasution, mengatakan :

"Ia ingin memberikan wacana baru kepada masyarakat, berdakwah, melayani orang-orang melalui partai politik. Ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sekitar, bahwa tidak semua partai itu sama seperti PKS adalah partai dakwah, Keinginan merubah keadaan yang adasekarang ini ke arah yang lebih baik berlandaskan tuntunanislami. Itulah yang memotivasi saya untuk terlibat aktif di bidang politik, khususnya di PKS". (Sumber: Hasil Wawancara Susi, 2015)

Keikut sertaan dalam berpartisipasi politik bukanlah paksaan dan memaksa diri untuk ikut tetapi, dengan ada niat, keyakinan memandang kaum perempuan sekarang ini, seperti diutarakan Mbak Nana, Sebagai Staff di DPD PKS Kota Medan yang menyebabkan ia turut bekerja di kantor PKS yaitu:

"Awalnya aktif dikampus sebagai aktivis. Setelah itu merasa tertarik untuk menjadi staff di DPD PKS. Dan PKS menjadipilihannya, karena visi misi yang dianggap sejalan dengan prinsip yang saya pegang, yaitu Islam." Lingkungan Masyarakat seperti yang dikatan seorang ibu beranak dua ini mengutarakan isi hatinya dalam berpartisipasi politik.

Sebut saja ibu Dila mengatakan: "*bahwa saya turut ikud dalam berpartisipasi dengan hati nurani saya untuk tujuan mengetahui kriteria calon pemimpin yang nantinya saya pilih yang akan bisa betul-betul membangun perubahan ekonomi masyarakat. Apalagi saat-saat ini kebutuhan pokok mahal anak saya dua pasti butuh biaya yang cukup untuk pendidikannya".*

Dari pernyataan diatas faktor utama yang mempengaruhi perempuan di dalam lembaga politik lebih pada kesadaran diri sendiri, dimana timbulnya kesadaran diri ini muncul darikeadaan dan posisi perempuan yang masih termarjinalkan dalam semua aspek kehidupan. Adanya keinginan untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kaum perempuan, adanyatindakan pemberdayaan perempuan.

Minimnya partisipasi perempuan dalam aktifitas politik. Pandangan bahwa

politik itu lekat dengan dunia laki-laki, perempuan tidak pantas berpolitik atau bahkanmenjadi pemimpin, baik karena alasan kemampuan maupun alasan agama adalah hegemoni patriarki. Masalah tersebut merupakan faktor kultural yang menjadi kendala bagi partisipasi perempuan di dalam lembaga politik.

Kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan serta komposisi pengambilan kebijakan yang minim jumlah perempuannya, adalah kendala struktural yang semakin menghadang partisipasi perempuan tersebut. Berbagai cara dan strategi untuk menguatkan partisipasi perempuan harus dilakukan, salah satunya adalah dengan kebijakan affirmative action yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum yang mencantumkan himbauan unuk memenuhi keterwakilan perempuan sejumlah 30% dalam pencalonan anggota legislatif di masing-masing partai politik. Walaupun dilahirkan dengan semangat demokratisasi, tetapi kebijakan ini menjadi setengah hati, karena tidak mensyaratkan keharusan bagi partai politik untuk memenuhi prinsip affirmative action. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga tidak sepenuhnya berjalan terutama karena masyarakat masih di dominasi oleh ideologi patriarki, dimana ada resistensi untuk memenuhi amanat Undang-Undang dengan berbagai alasan.

Beberapa Faktor Penghambat Partisipasi Politik di Ranah Politik Seperti yang dikatakan oleh salah satu perempuan di dalam anggota DPD partai keadilan sejahtera Kota Medan yaitu, Faktor *pertama* berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yangmasih sangat kental asas patriarkalnya. *kedua* berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecilpejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dankeadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politikmempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. *Ketiga*, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. *Keempat,* Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu.

Adapun Hambatan Partisipasi Politik Perempuan di ranah publik Antara Lain: Kurangnya keseimbangan gender di sektor politik dan pemerintahan merupakan hasil dari hambatan; struktural dan fungsional yang menghalangi partisipasi perempuan dalam ranah public; kebijakan yang diusulkan ini dibangun dari sebuah pemahaman yang holistik tentang marjinalisasi; kurangnya keterwakilan perempuan di tingkat pengambil keputusan di politik dan pemerintahan

Perempuan bukanlah sebuah kelompok yang homogeny, Mereka tidak memiliki keterbatasan dan peluang yang sama dalam berpartisipasi di ranah publik, dan identitas gender mereka termediasi melalui posisi sosial mereka sesuai dengan kelas, suku, agama dan pemisahan daerah perkotaan maupun pedesaan. Karenanya tindakan afirmatif dan yang mendukung peningkatan partisipasi perempuan di ranah publik harus mempertimbangkan keberagaman dan perbedaan dalam hal tingkatan perempuan di berbagai wilayah di Indonesia.

Seperti kita lihat saat ini begitu banyak cara-cara dan kegiatan-kegiatan yang di lakukan dan di jalankan dengan baik oleh Kaum Perempuan yang masuk dalam politik. Mereka melakukan adanya kegiatan pengajian para ibu-ibu, kegiatan perwiritan kaum Ibu-ibu. Sehingga mampu untuk Berkomunikasi dengan baik dan tidak Putus silaturahmi dalam memudahkan mengajak dan Bergaul Dalam dunia Politik, Agar juga perempuan tahu apa itu Politik bukan hanya melihat dan mendengar saja di TV tapi Mereka juga harus Ikut serta dalam Berpolitik yang sehat dan baik. Adapun Upaya agar dalam

peningkatan Partisipasi Politik perempuan di PKS kota medan antara lain Membangun akses ke media: Hal ini perlu mengingat media cetak dan elektronik sangat mempengaruhi opini para pembuat kebijakan partai dan masyarakat umum; Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikandan pelatihan: Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuanmereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggotaparlemen. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arenapolitik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik bukan arena yangpenuh konflik dan dan intrik yang menakutkan; Meningkatkan kualitas perempuan: menuntut suatu kapasitas yang kualitatif,mengingat bahwa proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar sistem. Peningkatan kualitas perempuan dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

SIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi perempuan dalam berpartisipasi politik adalah suatu pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor keluarga masuk dalam internal yang dikarenakan adanya pengaruh dari orang tua, suami maupun keluarga dan kerabat yang terjun kedunia politik sehingga mampu mempengaruhi anak, saudarah dari orang tua tersebut untuk dapat terjun kepartai orang tuanya sebagai pendukung. Sedangkan dari faktor lingkungan masyarakat masuk dalam eksternal yang di karenakan adanya tawaran dari partai politik.

Jadi, Partisipasi Politik Perempuan Sangat tinggi di lihat dari jumlah kader perempuan pada Tahun 2014 Sekitar 3000 kader perempuan di DPD Kota Medan.

PKS menyadari tidaklah mudah untuk menjadi anggota legislatif, siapapun itu orangnya baik laki-laki, maupun perempuan. Secara Garis Besar Perempuan di indonesia secara Hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk kesempatan yang sama dengan laki-laki berkiprah di Bidang Politik. Semoga diTahun mendatang jumlah perempuan yang memasuki panggung politik dan menduduki posisi di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif semakin meningkat demi menata Indonesia yang adil, sejahtera, makmur dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G.A, 1984.Sosialisasi Kebudayaan dan Partisipasi Politik, dalam Mochtar Mas'oed & Mac Andrews (Eds),Perbandingan Sistem PolitikYogyakarta: UGM University Press.

Aminuddin, H, 2008. Menghilangkan Trauma Persepsi, Jakarta:Sekretariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS dan Arah Press.

Budiarjo, M, 1989.Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia.

Budiarjo, M, Partisipasi Dan Partai Politik, Gramedia, Jakarta, 1998

Fadhila, P, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Alfabeta

Fealy, G, 2003. Dalam Tulisan Heri Kusmanto dan Warjio "Strategi Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta: PT. Gramedia

Hatta, M, Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan, Mutiara, Jakarta, 2000

Ihza, Yusril Mahendra, 2002. Dalam Jurnal Perempuan Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Msyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat Islami(Pakistan), Jakarta: Paramadina.

Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, hal.99

Kusmanto, H., (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 41-47.

Lubis, DA, 2009. Partisipasi Politik Perempuan(Tesis), Medan: USU

Martyn, Elizabeth. 2004. "Women's Movement in Postcolonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy". London: Routledge.

Moleong, L.J. 1988. Metode Penelitian Kualitatif,Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulia, S.M., dan Anik Farida, 2005. Perempuan dan Politik, Jakarta: Gramedia.

Nurrahmi NZ, 2009. Perempuan dan Politik (Skripsi), Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sahar L. Hassan, Kuat S., Dadi M.H. Basri, Memilih Partai Islam, Jakarta: Gema Insani Press,1998, hal. 29

Sanit, Arbi. 1995. Ormas dan Politik.Jakarta: Lembaga Studi Informasi Pembangunan

Sihite, Romany, 2007. Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sucipto, Ani Widiani, 2005. Kendala-kendalaTerhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen, Jakarta: Internasional IDEA Indonesia Suharyanto, A., (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 166-175

Surbakti Ramlan, memahami ilmu politik, Grasindo, Jakarta, 2003

Zohra, AB, 2000. Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Perempuan, Yogyakarta: YLKI Sulawesi Selatan.

.